

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN



Diajukan oleh :

FRENDI M BUTAR-BUTAR

NPM	: 140511677
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN



Diajukan oleh :

FRENDI M BUTAR-BUTAR

NPM : 140511677

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

A

G. Aryadi, SH., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN






Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 10 – January - 2020
Tempat	: Ruang Guru Besar Prof. Paul

Susunan Tim Penguji :

Ketua	: Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.	()
Sekretaris	: G. Aryadi, SH., M.H	()
Anggota	: Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.	()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yuli Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini penulis kupersembahkan kepada :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, selalu memberikan berkat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan hukum/Skripsi ini.
- ❖ Kepada sosok yang terbaik yaitu Orang tua saya Bapak Parluhutan Butarbutar dan Lasmaida Simanjuntak
- ❖ Adik – adik yang menjadi sumber inspirasi saya
- ❖ Serta seluruh keluarga



KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur dan Kerendahan hati, saya haturkan Terima Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungannya yang berlimpah kepada penulis selama melakukan penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN”**.

Tujuan penulisan hukum ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa selama penelitian ini dilakukan, banyak pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materil. Mulai dari awal sampai selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam mempersiapkan penelitian ini, yaitu :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih atas bimbingan dan motivasi bapak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas dedikasi Bapak/Ibu selama berkuliah di Fakultas Hukum
4. Bapak Parluhutan Butar-butar dan Lasmaida Simanjuntak selaku orang tua tercinta, adik- Rosdinawati Butarbutar dan Gisela Butarbutar.
5. Bapak AIPDA Slemat Triyuliawan, selaku personil Kepolisian Daerah (POLDA) D.I.Yogyakarta, bapak G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku advokat di kantor Pusat

Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Keluarga Besar Naposo Nairasaon Yogyakarta yang tidak bisa diucapkan semuanya
 7. Seluruh Keluarga Besar Naposo Simanjuntak Yogyakarta yang tidak bisa diucapkan semuanya
 8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu
- Adapun dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sebagai manusia tidak ada kata sempurna dan terdapat kekurangan, sehingga penulisan ini banyak kekurangan. Penulis berharap semua pihak memberikan dukungan untuk kedepannya lebih baik. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita

Yogyakarta, 12 Desember 2019
Penulis,

Frendi M Butarbutar

Abstract

The title of this legal research is the legal protection of victims in the process of investigating suspects of embezzlement. Research methods are normative methods. The problem in this legal research is how to protect the victims in the process of investigating suspects of embezzlement and what hinders the protection of victims. And the purpose of this legal research is to know the protection of victims of embezzlement at the stage of investigation and to find out which impedes the protection of victims of embezzlement. The conclusion of this legal research is that the protection of victims at the stage of investigation of embezzlement of criminal acts has been regulated in legislation, there are institutions that function to protect victims, only the need for better application. Hindrances in the form of a lack of understanding relating to the rights of victims, a difficult bureaucracy, LPSK is only in Jakarta, the victim's ignorance about the stages to obtain protection

Keywords: protection of victims, Victim, Investigation, embezzlement



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II. PEMBAHASAN	19

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	27
C. Perlindungan hukum bagi korban penggelapan dan proses dan bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.....	31
1. Proses dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.....	31
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.....	37
BAB III PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, kehidupan masyarakat tidak teratur dan terjadi kekacauan.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pembentuk aturan di negeri ini menitik

beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum. Suatu perbuatan menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam Undang-Undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia sehingga negara tetap memperhatikan hak setiap warga negaranya dalam hal jaminan perlindungan. Indonesia menerima hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat sebab dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Hukum dibuat untuk melindungi dan mengatur setiap aspek tingkah laku manusia dalam bermasyarakat agar terciptanya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Kemajuan dan perkembangan jaman menjadikan hukum merupakan hal yang sangat utama dalam perlindungan setiap hak warga negara. Penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat diharapkan mampu memenuhi hak warga negara dalam memperoleh perlindungan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Negara memiliki kewajiban yang besar untuk memberikan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia melalui peran dari pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan melalui cara pemenuhan hak, pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap korban tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana dilatar belakangi adanya sebab-akibat (kausalitas), yang artinya adanya suatu perbuatan dari korban yang memicu terjadinya suatu tindak pidana. Perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada korban tetap merupakan suatu kewajiban yang perlu untuk dilakukan, karena keadilan merupakan suatu hal yang tidak dapat untuk dikesampingkan tanpa harus mempertimbangkan peranan sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dalam Buku II dan III diatur tentang Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan dan Pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan dan meresahkan dalam masyarakat. Salah satu praktek kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah penggelapan. Perbuatan pidana ini banyak terjadi didalam masyarakat dan menimbulkan kerugian secara ekonomis yang bernilai ratusan ribu rupiah, jutaan rupiah, puluhan juta rupiah hingga bahkan triliunan rupiah.

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan pidana penggelapan dapat disebabkan karena faktor pemenuhan kebutuhan hidup, adanya niat dan kesempatan, sifat tamak dari manusia itu sendiri. Penggelapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI adalah proses, cara, perbuatan menggelapkan. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP menyebutkan Barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diacam karena penggelapan.”

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di Yogyakarta adalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh DH. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar Bulan Agustus 2010 di Koperasi Swamitra Bahtera Anugrah jalan. Lor Pasar Bringharjo Gondomanan Yogyakarta. DH yang ditawarkan oleh saudara MH dan saudara DL yang merupakan karyawan dari koperasi Swamitra Bahtera Anugrah yaitu dengan cara DH mencari calon nasabah yang mengajukan pinjaman ke koperasi Swamitra Bahtera Anugrah.

DH kemudian mencari orang yang akan menjadi calon nasabah dari koperasi Swamitra Bahtera Anugrah. Kemudian DH meminta kepada J,T,Sum, dan Sub berupa foto copy KTP suami-istri, C1, dan surat nikah. Dengan berbagai macam alasan kemudian DH juga meminta foto copy KTP suami-istri,C1, surat nikah kepada Sud dan ASW. DH kemudian menyerahkan segala persyaratan pengajuan kredit nasabah antara lain atas nama J,T,Sum,Sub,Sud, dan ASW yaitu berupa foto copy KTP suami-istri,C1, surat nikah namun tidak disertai dengan surat jaminan yang asli.

Pengajuan aplikasi kredit nasabah tetap disetujui dan uang tersebut di cairkan oleh pihak koperasi Swamitra Bahtera Anugrah. DH menerima uang dari pencairan aplikasi kredit nasabah tersebut dari MH antara lain nasabah atas nama J sebanyak 10 aplikasi sejumlah Rp. 153.277.100,-, atas nama T sebanyak 6 aplikasi sejumlah Rp. 95.259.700,-, Sum sebanyak 10 aplikasi sejumlah Rp. 165.800.00,-, Sub sebanyak 7 aplikasih sejumlah Rp. 124.608.200,-, Sud sebanyak 6 aplikasi sejumlah Rp. 116.000.000 dan ASW sebanyak

8 aplikasi sejumlah Rp. 154.000.000,- setelah dikurangi potongan bunga 5% dari yang seharusnya 3,5%.

DH tidak menyerahkan uang pencairan dana koperasi Swamitra Bahtera Anugrah kepada J,T,Sum,Sub. DH hanya menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000.000,- kepada Sud dan juga sekitar Rp.80.000.000,- kepada ASW. Berdasarkan kredit fiktif yang disita polisi kerugian diperkirakan sebesar Rp. 556.050.500;- Atas perbuatannya DH divonis melanggar Pasal 372 KUHP. Selain kasus diatas, masih banyak kasus-kasus penggelapan lainnya yang dapat merugikan korban secara materil.

Didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban tindak pidana harus memperoleh pelayanan yang lebih oleh pemerintah demi tetap menjamin keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia yang merupakan hak korban.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP tidak berpihak kepada korban dari tindak pidana karena lebih banyak mengatur perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Dampak dari kurangnya keberpihakan terhadap korban memberikan tekanan kepada korban dari pihak luar sehingga tidak berani untuk membongkar atau mengungkapkan suatu tindak pidana terjadi, sehingga mengakibatkan beberapa kasus tindak pidana gagal untuk dilakukan upaya penindakan yang semestinya.

Perlindungan terhadap korban merupakan suatu hal yang sangat penting demi mempermudah penegakan hukum dalam menemukan kejelasan suatu tindak pidana. Hak-hak dari korban yang telah diatur sebelumnya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban harus direalisasikan dengan tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap korban. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas tentang perlindungan korban dalam proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemenuhan perlindungan korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menambah ilmu pengeahuan, baik secara teoritis maupun praktis khususnya dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan tersangka pelaku Tindak Pidana Penggelapan.”

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan, membuat suatu kebijakan oleh pemerintah, maupun proses penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terkhusus tindak pidana penggelapan. Selain itu, diharapkan dapat menanggulangi kejahatan perlindungan korban tindak pidana penggelapan di Yogyakarta.

2. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan aturan perundang-undangan sehingga diharapkan mampu menciptakan keamanan, kedamaian, dan keadilan bagi korban tindak pidana

penggelapan. Bagi aparat penegak hukum agar dapat bersikap adil dalam memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, terkhusus tindak pidana penggelapan di Yogyakarta

3. Bagi korban

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang hak-hak yang dimiliki korban tindak pidana terkhusus tindak pidana penggelapan yang pada dasarnya dijamin dan dilindungi oleh aturan Undang-Undang, sehingga korban tindak pidana dapat memperoleh hak semestinya.

4. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban seorang korban dan menambah pengetahuan masyarakat tentang Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.

5. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat penulisan untuk menyelesaikan program Strata-1 pada fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan untuk menuangkan pikiran secara ilmiah dari segi teori mengenai Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta” adalah asli karya dari penulis dan tidak merupakan suatu plagiasi atau duplikasi dari karya dari pihak-pihak lain.

Hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan karya yang lain adalah lebih terkhusus pada “ Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.” Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta dan hambatan yang di alami dalam memberikan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan.

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya penulis lain, maka hasil karya yang berhubungan dengan penulisan ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Valeria Rezha Pahlevi NPM : 120510898

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul

“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.”

Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap seorang anak yang menjadi korban tindak pidana?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Pendampingan
- b. Penempatan di Shelter atau rumah aman

Pendampingan yang dilakukan oleh orang tua, dinas sosial yang berkerja sama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sleman. Hambatan yang dialami oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak seperti korban tidak fokus, takut, trauma dan merasa

terancam sehingga menyulitkan atau menghambat untuk pendampingan terhadap korban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahida Azahrah NPM : 13410230 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri.” Penelitian membahas tentang:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para nasabah Bank Mandiri yang saldonya berkurang karena tindak pidana pencurian data?.
2. Apakah pihak Bank Mandiri bisa diminta pertanggungjawaban atas kelalaian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian data nasabah?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Perlindungan Hukum bagi nasabah Bank Mandiri akibat kasus pencurian data berupa:
 - a. Pemberian ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban pencurian data nasabah bank mandiri
 - b. Ancaman pidana bagi pelaku pencurian data nasabah Bank Mandiri yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 378 KUHP
 2. Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008
 3. Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008

2. Pertanggungjawaban Pidana Bank Mandiri terhadap terhadap Nasabah Akibat Tindak Pidana Pencurian Data dapat diberikan apabila:
 - a. Terjadinya pencurian data nasabah ini diakibatkan dari sistem Bank yang error atau murni dari kelalaiin pegawai Bank
 - b. terjadinya pencurian data nasabah tersebut terjadi akibat dari kesalahan pegawai yang bertindak atas nama Bank Mandiri atau pegawai Bank Mandiri yang terbukti memberikan sarana kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian data
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dhatma Satria Bakara NPM : 140511699 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Perlindungan Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan.” Penelitian membahas tentang :
 1. Bagaimana Implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta?
 2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta?

Hasil dari penelitan yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta:
 - a. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh kepolisian berupa pos pengaduan, penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, menahan pelaku, dan memberikan informasi terkait perkara.

- b. Bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh PBKH dan P2TPAKK RDU memberikan pendampingan, nasihat hukum, rehabilitasi, konseling, rujukan hingga menyediakan shelter atau rumah aman.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiyaan di Yogyakarta yang dialami oleh kepolisian Daerah DIY, PBKH dan P2TPAKK RDU adalah aparat tidak memiliki kewenangan yang luas, korban tidak bersifat kooperatif dalam memberikan keterangan karena mengalami trauma yang berat, kurangnya percaya terhadap aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban serta anggaran pembiayaan yang terbatas dapat menghambat untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiyaan

F. Batasan konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum berupa:

1. Perlindungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 disebutkan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Penyidikan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 1 angka 2 menyebutkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHP yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

5. Penggelapan

Menurut KUHP Pasal 372 tindak pidana penggelapan adalah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial untuk memperoleh data primer yang didukung data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.”

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden sebagai data utama yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.”

b. Data Sekunder

Penelitian hukum empiris memerlukan data sekunder sebagai pendukung, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 s/d 376
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 98 s/d 101
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia noemer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupan fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari:

- a. Buku, Jurnal Hukum, Internet, Surat Kabar yang berkaitan.
- b. Dokumen adalah surat kyang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah dokumen tentang data pelindungan korban yang dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan di Yogyakarta.

3. Metode Penggumpulan data

a. Data Primer

Memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara, yaitu penelitian melakukan wawancara kepada responden dengan cara mengajukan pertanyaan yang ditelah disusun terlebih dahulu secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta. Wawancara

menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu penulis tidak menyediakan jawaban, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada bapak AIPDA Slamet Triyaliawan selaku personil polisi di Polda D.I.Yogyakarta dan bapak G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku advokat di kantor pusat bantuan dan konsultasi hukum universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam hal ini data diperoleh dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Bantuan Dan Konsultasi Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan untuk membaca, menelaah dan mempelajari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.

4. Narasumber

Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atau pernyataan peneliti berdasarkan wawancara terbuka yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dalam hal ini bapak AIPDA Slamet Triyaliawan adalah sebagian petugas Kepolisian Daerah Istiewa Yogyakarta, bapak G. Widiartana, S.H., M.Hum. adalah sebagai advokat di Pusat Bantuan dan konsultasi Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang berdasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden serta hasil penelitian kepustakaan.

Berdasarkan analisis data tersebut, penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan berupa asumsi khusus.

H. Sistematika Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah dari penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. Berdasarkan perumusan tersebut maka dikemukakan tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang konsep/variable pertama merupakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap korban korban tindak pidana adapun isi dari tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap korban tersebut berupa pengertian perlindungan hukum, korban, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Konsep/variable kedua merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan adapun tinjauan

umum tentang tindak pidana penggelapan berupa pengertian penggelapan, tindak pidana penggelapan, dan jeni-jenis tindak pidana penggelapan.

Konsep/variable ketiga merupakan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penggelapan diberikan oleh polisi. Bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh korban yaitu :
 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
 2. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
 3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 4. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Apabila korban belum memperoleh perlindungan secara maksimal, korban tindak pidana penggelapan dapat mengajukan permohonan kepada kepolisian untuk diberikan perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan yang dihadapi yaitu :
 1. Pemahaman aparat kepolisian terhadap hak-hak korban masih kurang.
 2. Aparat kepolisian yang bersifat pasif.
 3. Keberadaan LPSK yang masih di pusat.

4. Birokrasi untuk meminta perlindungan yang tidak sederhana
5. Tidak mengetahui mekanisme yang harus ditempuh oleh korban

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan penulis tentang perlindungan korban dalam proses penyidikan tersangka tindak pidana penggelapan dan hambatan – hambatannya.

Maka penulis menyarankan untuk dilakukannya hal sebagai berikut:

1. Membangun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disetiap provinsi yang ada di Indonesia;
2. Melakukan penyerdehanaan birokrasi untuk memperoleh perlindungan hukum bagi korban tindak pidana;
3. Aparat kepolisian harus benar-benar dalam memberikan memberikan perlindungan bagi korban sehingga korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban tanpa ada diskriminasi
4. Melakukan sosialisasi tentang hak – hak yang dimiliki oleh korban dan upaya untuk memperoleh perlindungan terhadap korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta :Pustaka Harapan
- Maria Alfons 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya.
- M.Sudrajat Bassar 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya
- P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Grafika
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Intenet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 21.30